



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sultan Syahit No. 42 2^o/Fax. 21200, 25224

PANGKALAN BUN 74112

Sekretariat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pangkalan Bun 74112

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth	Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat
Dari	Kepala Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Desa
Tembusan	*
Tanggal	20 Juli 2020
Nomor	414.2/84 /DPMID-PPD/VII/2020
Sifat	Bisnis
Lampiran	1 Lembar Ceklist BLT DD
Hal	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Rekonsiliasi Data Realisasi Pelaksanaan APBDes Sampai Dengan 30 Juni 2020 (Semester I) Kecamatan Arut Utara.

I. PENDAHULUAN

A. Umum/Latar Belakang

1. Sebagai upaya dalam pencegahan kesalahan administrasi dalam penyaluran BLT DD , maka diperlukan pengecekan administrasi dan kelengkapan dokumen BLT DD untuk masing-masing Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Perlu adanya sinkronisasi data antara Aplikasi Siskeudes dengan data pendukung yang ada terutama rekening koran demi menghasilkan Laporan Semester I yang teruji.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. DPA SKPD Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 900/18/I/DPA.SKPD/2020, Tanggal 30 Desember 2019.
3. Persetujuan Kepala Dinas PMD Kotawaringin Barat tanggal 30 Juni 2020 perihal melaksanakan Monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Rekonsiliasi Data Realisasi Pelaksanaan APBDes Sampai Dengan 30 Juni 2020.
4. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 841.5/119/DPMID.A/VII/2020 Tanggal 24 Februari 2020 perihal Melaksanakan Perjalanan Dinas Monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Rekonsiliasi Data Realisasi Pelaksanaan APBDes Sampai Dengan 30 Juni 2020 (Semester I) Kecamatan Arut Utara.

C. Maksud dan Tujuan :

1. Melakukan pengecekan administrasi BLT DD sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
2. Melakukan Rekonsiliasi Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
3. Mendapatkan data angka yang valid untuk laporan Keuangan Semester I Tahun 2020
4. Untuk memberikan pembinaan dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada dalam Penatausahaan Keuangan Desa.

II. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

1. Desa yang dilakukan pengecekan adalah seluruh Desa di Kecamatan Arut Utara.
2. Rekonsiliasi Data Keuangan dari Siskeudes dengan rekening Koran sampai dengan 30 Juni 2020.
3. Pengecekan SPJ dan berkas pendukung terkait BLT DD 2020 sampai dengan yang terakhir dilaksanakan.
4. Tanya jawab penatausahaan keuangan Desa dan perbaikan aplikasi Siskeudes 2020.
5. Menyampaikan petunjuk penyusunan Laporan Semester I Tahun 2020

III. KEGIATAN YANG DISTEMPEL

1. Pelaksanaan Rekon:

- Masih ada Desa yang mengalami trouble dalam penggunaan aplikasi Siskeudes karena adanya pergantian Operator siskeudes, pergantian Laptop, maupun karena faktor lain dari laptop (virus dll).
- Hampir semua Desa lupa cara dan teknik dalam melaksanakan penatausahaan menggunakan Aplikasi Siskeudes termasuk pelaporannya.
- Masih banyak ditemukan pola pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, misalnya penggunaan SPP Defenitif dan SPP Panjar.
- Disampaikan agar operator Siskeudes lebih mendalami teknik pengelolaan keuangan Desa menggunakan aplikasi Siskeudes, dan juga Kaur Keungan lebih disiplin dalam menerapkan penatausahaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku.

2. Pelaksanaan Pengecekan Administrasi BLT DD

- Ditemukan penyaluran di luar pengesahan, karena ada perubahan data yg belum melalui musdesus.
- Ada beberapa Desa yang belum memiliki Berita acara atau surat pernyataan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan menolak atau tidak menerima BLT DD.
- Ada beberapa Desa yang Tanda penerimaanya masih diragukan keasliannya (palsu) karena mungkin kendala teknis yg ada dilapangan (belum ketemu orangnya dsb).

IV. KESIMPULAN -

A. Kesimpulan :

1. Untuk penatausahaan berbasis aplikasi Siskeudes, sering kali digunakan hanya untuk pencairan (menghasilkan SPP) selebihnya belum dilakukan penginapan.
2. Permasalahan yang disampaikan di point 1 diatas, membuat hasil laporan tidak bisa *up to date* (*sesuai waktu*) dan lupa untuk melanjutkan proses yang ada.
3. Penyaluran BLT DD menimbulkan permasalahan administrasi yang harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

B. Saran :

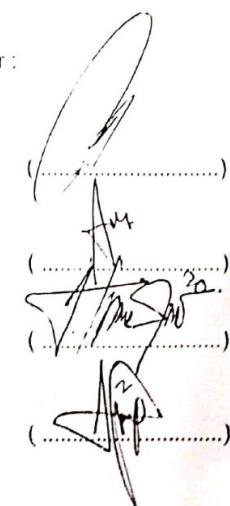
1. Mengimbau Kepala Desa untuk tidak merubah Operator yang sudah menguasai Aplikasi Siskeudes, kalaupun terjadi harus ada transfer ilmu terlebih dahulu
2. Mengimbau kecamatan agar meningkatkan kapasitas pendampingan di wilayah masing-masing, terutama penatausahaan Keuangan melalui aplikasi Siskeudes
3. Monitoring berkala adalah solusi untuk pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan keuangan desa baik karena kesengajaan maupun ketidakpahaman regulasi.
4. Membuat Siskeudes menjadi online adalah salah satu alternatif untuk mengkontrol pengelolaan keuangan Desa demi mencegah kesalahan-kesalahan dalam penggunaan Aplikasi dan intervensi secara langsung tentang kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

V. PENUTUP

Demikian laporan Perjalanan Dinas ini disampaikan untuk diketahui dan sebagai bahan lebih lanjut. Terima Kasih

Yang Melapor :

1. ELPRAMIT CP.,SE, M.Si
NIP. 19800315 200312 1 008
2. K. SUBETA RDA, SE
NIP. 19840913 201001 1 011
3. AGUSTINE E. BINTI , ST
NIP. 19730819 201406 2 004
4. MAHFUZAN, S.Ak
NIP. 19840514 201001 1 014



III. KEGIATAN YANG DIJALANI

1. Pelaksanaan Siskeudes

- Meski ada Desa yang menggunakan teknik dilansir menggunakan teknik dilansir menggunakan teknik dilansir menggunakan teknik dilansir (atau bukan teknik dilansir)
 - Hampir semua Desa juga cara dan teknik dilansir menggunakan teknik dilansir menggunakan teknik dilansir menggunakan teknik dilansir
 - Meski banyak desa yang menggunakan teknik dilansir dengan catatan di lapangan masih menggunakan SPP Dikabut dan SPP Dikasi
 - Diemphasikan agar operator Siskeudes lebih memahami teknik pengelolaan keuangan Desa menggunakan aplikasi Siskeudes dan juga Kair Keuangan lebih diperbaiki dalam memperbaiki penyalahgunaan keuangan secara regulasi yang berlaku
-
- 2. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi BLT DD
 - Ditemukan penyalurah di luar pengelolaan, karena adanya perbaikan data yg belum melahirkan musdesus
 - Ada beberapa Desa yang belum memiliki Berita acara atau surat pernyataan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan membutuhkan atau tidak menerima BLT DD
 - Ada beberapa Desa yang Tanda penerimaannya masih diragukan keaslinya (palsu) karena mungkin kendala teknis yg ada dilapangan (belum ketemu orangnya dsb)

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan :

- 1 Untuk penatausahaan berbasis aplikasi Siskeudes, sering kali digunakan hanya untuk pencatatan (menghasilkan SPP) selebihnya belum dilakukan penginputan
- 2 Permasalahan yang disampaikan di point 1 diatas, membuat hasil laporan tidak bisa *up to date* (semaunya waktu) dan lupa untuk melanjutkan proses yang ada
- 3 Penyaluran BLT DD menimbulkan permasalahan administrasi yang harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

B. Saran :

- 1 Mengimbau Kepala Desa untuk tidak memberi Operator yang sudah menguasai Aplikasi Siskeudes, kalaupun terjadi harus ada transfer ilmu terlebih dahulu
- 2 Mengimbau kecamatan agar meningkatkan kapasitas pendampingan di wilayah masing-masing, terutama penatausahaan Keuangan melalui aplikasi Siskeudes
- 3 Monitoring berkala adalah solusi untuk pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan keuangan desa baik karena kesenjangan maupun ketidakpahaman regulasi
- 4 Membuat Siskeudes menjadi online adalah salah satu alternatif untuk mengontrol pengelolaan keuangan Desa demi mencegah kesalahan-kesalahan dalam penggunaan Aplikasi dan intervensi secara langsung tentang kepatuhan terhadap regulasi yang ada

V. PENUTUP

Demikian laporan Perjalanan Dinas ini disampaikan untuk diketahui dan sebagai bahan lebih lanjut. Terima kasih

Yang Melapor

1. ELPRAMIT CP.,SE, M.Si
NIP. 19800315 200312 1 008

2. K. SUBETA RDA, SE
NIP. 19810913 201001 1 011

3. AGUSTINE E. BINTI, ST
NIP. 19730819 201406 2 004

4. MAHFUZAN, S.Ak
NIP. 19840514 201001 1 014

NO	DESA	KELENGKAPAN MUSDES PENETAPAN HASIL PENDATAAN	SK CAMAT PENGESAHAN KTP BUT + LAMPRAN DAFTAR NAMA	PERKADES KTP BLT + LAMPRAN DAFTAR NAMA	LAPORAN REKONSILIASI BLT DO			Tidak Benar atau Berangsur BLT Tidak Diterima	Tidak Benar atau Berangsur BLT Tidak Diterima
					SURAT PEPINTAAN PEMBAYARAN SERTI	KVK ANSI PEMESAYARAN	DAFTAR BLT PENERIMA BLT		
44.	Nanga Muia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓
45.	Sukarame	✓	✓	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	✓	✓	Tidak Ada	✓
46.	Gandis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47.	Kerabu	Tidak Ada	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓
48.	Sambi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓
49.	Penyoméan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓
50.	Pandau	✓	-	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓
51.	Riam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓
52.	Panaha-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓
53.	Sungai Deua	✓	✓	✓	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	✓	Tidak Ada	✓